

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inflasi merupakan indikator kritis dalam lanskap ekonomi berbagai negara di seluruh dunia. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dapat langsung mengurangi daya beli masyarakat. Akibatnya, individu memiliki daya beli untuk mendapatkan lebih sedikit barang dan jasa. Fenomena ini memberikan pengaruh langsung terhadap kapasitas individu untuk mengelola kehidupan sehari-hari (Rosyadi, 2019).

Sebaliknya, dampak inflasi terhadap daya beli individu berbeda-beda di berbagai kelompok pendapatan. Inflasi memberikan dampak yang lebih besar pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, yang sebagian besar penghasilannya dihabiskan untuk kebutuhan dasar seperti makanan, energi, dan perumahan (Ridwan, 2022). Penurunan daya beli masyarakat lebih lanjut berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi. Dalam konteks inflasi yang tinggi, daya beli dari pendapatan akan tergerus, sehingga mengakibatkan berkurangnya nilai riil pendapatan. Hal ini dapat mengurangi “*real balance effect*”, di mana individu merasa mengalami penurunan kekayaan serta akan mengarah pada penurunan pengeluaran dan konsumsi rumah tangga, yang merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi (Blanchard, 2017).

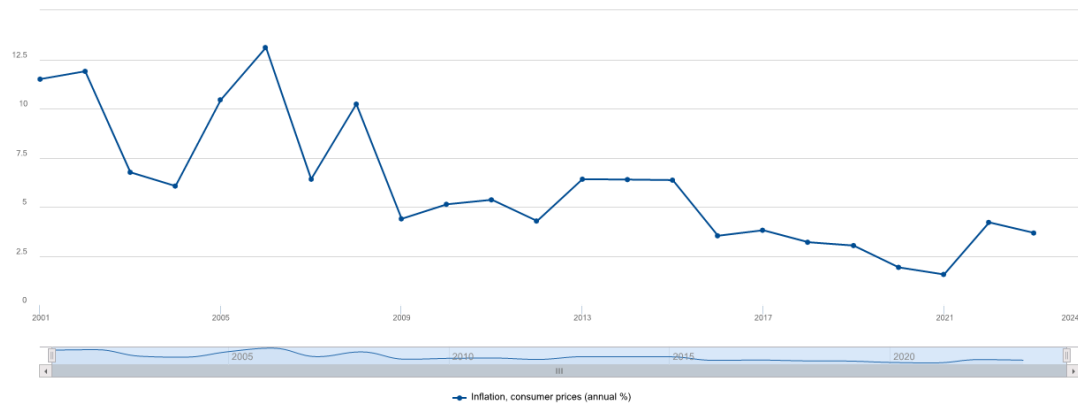


Sebagai negara berkembang, Indonesia rentan terhadap gejolak inflasi dipicu oleh faktor domestik dan global. Selama dua dekade terakhir, Asia menghadapi dinamika inflasi yang bervariasi. Telaah menyeluruh

terhadap data tren inflasi di Indonesia selama 24 tahun terakhir (2001 - 2024) menunjukkan beberapa titik kritis di mana inflasi di Indonesia mengalami lonjakan dan peluruhan yang signifikan.

Seperti halnya pada periode inflasi tinggi (2001) akibat krisis moneter pasca-1998, Indonesia memasuki era reformasi ekonomi dengan liberalisasi pasar dan penghapusan subsidi secara bertahap, yang meningkatkan volatilitas harga komoditas pangan (Timmer, 2005). Selama periode ini, inflasi tetap tinggi karena transisi yang sedang berlangsung dalam lanskap politik dan kebijakan. Pada tahun 2003, inflasi menurun dari 12,55 persen pada tahun 2001 menjadi 5,06 persen. Penurunan ini merupakan pencapaian yang dilakukan pemerintah dan Bank Indonesia dengan penerapan kebijakan moneter yang ketat. Meskipun banyak keluhan yang diajukan oleh UMKM mengenai biaya pinjaman yang terlalu tinggi, kebijakan ini terbukti efektif dalam menekan inflasi dan, terutama, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pada tahun 2003, nilai tukar rupiah (USD/IDR) berfluktuasi pada kisaran 8.500-9.000, yang menandakan tingkat stabilitas yang lebih baik dibandingkan dengan periode krisis di tahun 1998, ketika rupiah mencapai Rp 16.000 per USD.





Country : Indonesia
 Source: World Development Indicators
 Created on: 04/23/2025

Sumber: World Development Indikator, World Bank.

Gambar 1.1.1 Grafik Tingkat Inflasi IHK di Indonesia Tahun 2001 - 2023

Pada tahun 2005, inflasi melonjak menjadi 17,11 persen, yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar bersubsidi sebesar 126 persen (dari Rp 1.800 per liter menjadi Rp 4.000 per liter) dengan tujuan untuk mengurangi beban subsidi fiskal. Menurut Bank Indonesia (2006), kenaikan bahan bakar di tahun 2005 menyumbang 5,3 persen pada kenaikan inflasi. Oleh karena itu, Pemerintah dan Bank Indonesia mengadopsi kerangka kerja “*inflation targeting*” di tahun 2005 dengan tujuan untuk menstabilkan ekspektasi inflasi. Namun, pada tahun 2008, faktor-faktor eksternal, termasuk krisis keuangan global dan lonjakan harga minyak dunia (mencapai USD 147 per barel), memberikan pengaruh yang signifikan ap inflasi. Pada saat yang sama, inflasi mencapai 11,06 persen.

Selama periode pandemi Covid-19 (2020-2022) yang menyebar ke seluruh terjadi kontraksi ekonomi secara keseluruhan. Fenomena ini menyebabkan



penekanan permintaan agregat, yang pada akhirnya menghasilkan inflasi yang rendah (1,68 persen pada tahun 2020 dan 1,87 persen pada tahun 2021). Inflasi yang rendah ini dapat dikaitkan dengan penurunan konsumsi, akibat dari kebijakan lockdown pemerintah yang bertujuan untuk mencegah penyebaran virus corona (SARS-CoV-2). Pada tahun 2022, indeks harga konsumen melonjak menjadi 5,51 persen, yang dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar non-subsidi (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2022) dan lonjakan harga pangan dan energi di seluruh dunia, yang diperparah oleh konsekuensi dari invasi Rusia ke Ukraina (IMF, 2023).

Dalam konteks merebaknya pandemi Covid-19, pola fluktuasi inflasi, yang puncaknya pada kenaikan inflasi 2022, juga dialami oleh beberapa negara di dunia. Sementara itu, terjadi perdebatan di antara para ekonom yang mencoba menjelaskan akselerasi inflasi. Debat tersebut berputar pada pertanyaan: apakah penyebab akselerasi inflasi berasal dari sisi permintaan atau penawaran? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, para ekonom terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu permintaan (*demand pull inflation*) dan penawaran (*cost push inflation*).

Argumen dari sisi permintaan dari persamaan harga menyatakan bahwa permintaan ditentukan oleh jumlah uang yang dimiliki oleh individu dan perusahaan, baik di rekening bank atau lainnya. Ini adalah argumen monetaris untuk inflasi yang didasarkan pada teori kuantitas uang. Dengan asumsi bahwa kecepatan peredaran uang tetap konstan, peningkatan jumlah uang yang beredar suatu perekonomian umumnya akan menyebabkan kenaikan harga.



Sebaliknya, jika jumlah uang beredar meningkat dengan kecepatan yang melebihi produksi barang dan jasa (PDB Nominal), maka akan terjadi inflasi.

Sedangkan argumen sisi penawaran dari persamaan harga, menyatakan bahwa inflasi harga berasal dari kenaikan biaya produksi yaitu, bahan baku dan upah. Ketika perekonomian menunjukkan “kelesuan” (kekurangan permintaan), maka memungkinkan untuk mempekerjakan lebih banyak penduduk yang menganggur. Bersamaan dengan itu, hal ini memungkinkan pemanfaatan kapasitas industri yang kurang dimanfaatkan dan kelebihan persediaan, sehingga mengurangi risiko inflasi. Namun, dalam kondisi lapangan kerja penuh (*full employment*), akan sulit untuk menambah pasokan, sehingga memungkinkan pekerja untuk menuntut upah yang lebih tinggi. Hal ini, pada gilirannya, memberikan tekanan pada perusahaan untuk menaikkan harga. Oleh karena itu, terjadi *trade-off* antara tingkat pengangguran dan harga. Pertukaran ini dapat dicirikan oleh kurva grafis, yang dinamai kurva Phillips.

Disisi lain, faktor eksternal juga turut berkontribusi terhadap akselerasi inflasi di sisi penawaran karena berpengaruh pada kenaikan biaya produksi dan distribusi. Seperti kenaikan harga minyak dunia dapat meningkatkan biaya transportasi, listrik, dan bahan baku turunan (Kurniawan, 2022). Selain itu, depresiasi mata uang asing juga dapat memicu kenaikan harga barang impor, seperti bahan baku, mesin dan bahan bakar sehingga menaikkan biaya produksi yang akan diteruskan ke harga produk akhir (Rasidin et al., 2021).



Analisis penyebab inflasi merupakan studi yang krusial karena engaruhi pembuatan kebijakan untuk menjaga stabilitas perekonomian.

Disisi lain, respon pemerintah dalam mengatasi inflasi sangat sensitif terhadap fluktuasi inflasi. Maka dari itu, dilema dalam menentukan penyebab inflasi merupakan masalah yang sering ditemui dalam pembuatan kebijakan makroekonomi.

Sejumlah penelitian telah dilakukan dengan menunjukkan hubungan pengeluaran pemerintah berlebih dalam bentuk bantuan sosial dengan respons pemerintah yang terlalu reaktif terhadap pandemi. Blanchard dan Bernanke (2022) mengaitkan lonjakan inflasi yang terjadi setelah kemerosotan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi dengan tiga faktor. Pertama, mereka berpendapat bahwa pengeluaran fiskal selama pandemi berlebihan. Kedua, mereka berpendapat bahwa kebijakan moneter terlalu longgar, sebagaimana dibuktikan dengan rendahnya suku bunga yang berlaku selama periode ini. Ketiga, mereka menunjuk pada akumulasi tabungan yang kemudian dibelanjakan selama pemulihan ekonomi. Fenomena ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi permintaan agregat yang kuat. Menurut teori kuantitas uang, permintaan ditentukan oleh jumlah uang yang dipegang oleh masyarakat. Peningkatan permintaan agregat mengindikasikan peningkatan jumlah uang beredar dalam masyarakat. Tanpa adanya peningkatan produksi barang dan jasa, peningkatan jumlah uang beredar dapat menyebabkan inflasi.

Telah dikemukakan bahwa pandemi global yang sedang berlangsung serta konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina, telah memicu gangguan pasokan, na di bidang energi dan makanan. Memang, kedua faktor ini memberikan ruh pada kenaikan inflasi. Namun demikian, pemerintah berkewajiban untuk



mengatasi penyebab yang ada. Jika penyebab utamanya diidentifikasi sebagai kelebihan permintaan, tindakan yang paling efektif adalah pengetatan moneter (Stiglitz, 2022).

Implementasi kebijakan moneter oleh pemerintah biasanya didasari oleh teori kuantitas uang, dengan tujuan untuk mengatur inflasi. Teori ini menyatakan bahwa inflasi dipicu oleh prevalensi sumber daya keuangan dalam suatu perekonomian, sehingga mengakibatkan peningkatan permintaan agregat dibandingkan dengan output agregat. Oleh karena itu, tujuan dari kebijakan moneter adalah untuk mengatur permintaan agregat dengan mengontrol suku bunga agar pinjaman menjadi lebih atau sedikit mahal (Mishkin, 2022). Instrumen kebijakan moneter yang menetapkan suku bunga untuk mengendalikan jumlah uang beredar disebut politik diskonto.

Inflasi merupakan fenomena yang kompleks sehingga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Inflasi sering dipengaruhi oleh faktor permintaan dan penawaran, namun penelitian-penelitian yang membahas inflasi, sering berfokus pada satu sisi. Khususnya di Indonesia sebagai negara importir minyak sangat rentan terhadap volatilitas harga minyak dunia. Disisi lain, dinamika upah dan ekspansi moneter yang merupakan perangkat utama pengendalian inflasi, berpotensi memicu tekanan inflasi multidimensi. Minimnya penelitian yang mengintegrasikan variabel permintaan (JUB dan Suku Bunga) dan Penawaran (upah, minyak, dan kurs) dalam satu model analisis inflasi di Indonesia menjadi

penelitian ini muncul. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **“Analisis Indonesia: Tinjauan Sisi Permintaan dan Sisi Penawaran”**.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut

1. Apakah jumlah uang beredar berpengaruh terhadap inflasi dari sisi permintaan di Indonesia?
2. Apakah suku bunga berpengaruh terhadap inflasi dari sisi permintaan di Indonesia?
3. Apakah upah berpengaruh terhadap inflasi dari sisi penawaran di Indonesia?
4. Apakah harga minyak bumi berpengaruh terhadap inflasi dari sisi penawaran di Indonesia?
5. Apakah kurs berpengaruh terhadap inflasi dari sisi penawaran di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, tujuan penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah uang beredar terhadap inflasi sisi permintaan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh suku bunga terhadap inflasi sisi permintaan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh upah terhadap inflasi sisi penawaran di Indonesia.



4. Untuk mengetahui pengaruh harga minyak bumi terhadap inflasi sisi penawaran di Indonesia.

5. Untuk mengetahui pengaruh kurs terhadap inflasi dari sisi penawaran di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini dapat memperdalam pemahaman terkait perkembangan inflasi di Indonesia baik dari sisi permintaan dan penawaran.
2. Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk menilai pemahaman kita terkait penyebab inflasi dari sisi permintaan dan penawaran.
3. Penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk merespon penyebab utama inflasi di Indonesia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Inflasi

2.1.1.1 Pengertian Inflasi

Menurut Boediono (2016), inflasi merupakan kecenderungan harga-harga untuk naik secara umum dan berlangsung terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada sebagian besar barang-barang lain. Selain itu, kenaikan harga dalam satu waktu saja juga tidak dapat dikatakan terjadi inflasi, seperti pada momen hari raya. Namun, kenaikan harga tersebut terjadi pada beberapa waktu lamanya (Tambunan 2016). Rahardja dan Manurung (2017), merangkum syarat suatu fenomena kenaikan harga sehingga dapat dikatakan terjadi inflasi. Menurutnya, terdapat tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi, yaitu kenaikan harga, bersifat umum, dan berlangsung terus menerus.

Kenaikan harga pada barang dan jasa akan mengakibatkan inflasi yang implikasinya adalah penurunan nilai mata uang. Hal ini berarti penurunan nilai uang terhadap harga barang dan jasa (Yuniarti, dkk., 2021). Penurunan nilai uang terhadap harga barang dan jasa merupakan implikasi dari pertumbuhan jumlah



yang ada dalam perekonomian. Jadi, ada perkembangan moneter yang tidak Faktor utama yang menyebabkan kenaikan harga adalah adanya tahanan kuantitas uang yang tidak terkendali atau seperti argumen Milton

Friedman yang terkenal itu bahwa *“inflation is always and everywhere a monetary phenomenon....”*.

2.1.1.2 Pengukuran Inflasi

Karena Inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan berlangsung secara terus menerus, inflasi biasanya diukur dalam arti luas, seperti kenaikan harga secara keseluruhan atau biaya hidup di suatu negara. Namun, inflasi juga dapat diukur untuk sekelompok barang, seperti makanan dan jasa (Bank Indonesia, 2018). Seiring pertumbuhan ekonomi, semakin sulit mengukur inflasi. Untuk mengukur inflasi dari waktu ke waktu, digunakan angka indeks. Angka indeks terdiri dari sejumlah barang dan jasa yang digunakan untuk menghitung inflasi. Kelompok barang dan jasa diberi bobot sesuai dengan seberapa banyak barang dan jasa tersebut digunakan. Semakin banyak suatu barang atau jasa digunakan, maka semakin besar pengaruhnya terhadap tingkat inflasi. Perubahan angka indeks dari satu titik waktu ke titik waktu lainnya adalah tingkat inflasi untuk periode tersebut.

Menurut Arnold dan Auer (2015), cara umum dalam mengukur tingkat inflasi yaitu dengan menggunakan tingkat pertumbuhan yang direpresentasikan oleh Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK adalah indeks yang mengukur rata-rata perubahan harga dari sekelompok barang dan jasa yang dikonsumsi secara massal oleh rumah tangga dalam kurung waktu tertentu. Laju inflasi dihitung

n menggunakan angka IHK dari dua periode waktu berurutan untuk
tukan persentase perubahannya.



$$Inflasi = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100 \quad (2.1)$$

Meskipun masih memiliki kekurangan, IHK merupakan konsep yang paling sering digunakan dalam mengukur inflasi.

Selain IHK, PDB Deflator juga merupakan indeks harga yang sering digunakan dalam mengukur inflasi (Sarnio, 2024). Indeks ini menghitung PDB Nominal (berdasarkan harga yang berlaku) dalam PDB riil (berdasarkan harga tetap).

$$PDB \text{ Deflator} = \frac{PDB \text{ Nominal}}{PDB \text{ Riil}} \times 100 \quad (22)$$

Mengukur tingkat inflasi menggunakan PDB Deflator berarti mengukur tingkat perubahan harga seluruh barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

$$Inflasi = \frac{Df_t - Df_{t-1}}{Df_{t-1}} \times 100 \quad (2.3)$$

2.1.1.3 Penyebab Inflasi

Suatu faktor ekonomi dapat dikatakan mendorong inflasi apabila terdapat korelasi antara kenaikan atau penurunan angka indeks suatu faktor ekonomi terhadap kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Banyak faktor yang dapat mendorong terjadinya inflasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, inflasi terjadi melalui mekanisme permintaan dan penawaran agregat dalam suatu perekonomian. Secara umum, faktor pendorong terjadinya inflasi

langsung diklasifikasikan menjadi dua yaitu inflasi dari sisi permintaan (inflasi tarikan permintaan) dan inflasi dari sisi penawaran (inflasi dorongan biaya).



1. Inflasi Tarikan Permintaan

Inflasi Tarikan Permintaan (*Demand Pull Inflation*) terjadi ketika permintaan agregat mengalami kenaikan melebihi penawaran agregat yang menyebabkan tekanan permintaan berlebih. Permintaan Agregat merupakan total barang dan jasa yang diminta dalam suatu perekonomian. Menurut Mishkin (2019) terdapat empat komponen yang membentuk permintaan agregat, yaitu *consumption expenditure*, *planned investment spending*, *government purchases*, dan *net exports*. Peningkatan komponen tersebut secara kolektif menyebabkan kenaikan permintaan agregat.

$$Y^{AD} = C + I + G + NX \quad (2.4)$$

Kurva permintaan agregat menunjukkan hubungan antara kuantitas output yang diminta dan tingkat harga agregat. Dengan kata lain, kurva permintaan agregat menunjukkan kuantitas barang dan jasa yang ingin dibeli pada tingkat harga tertentu (Mankiw, 2019). Kurva permintaan agregat dapat diturunkan dari persamaan *The Quantity Theory of Money*.

2. Inflasi Dorongan Biaya

Inflasi dorongan biaya (*Cost Push Inflation*) terjadi ketika kenaikan harga biaya produksi menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa dalam perekonomian. Proses kenaikan ini dimulai dari naiknya harga barang yang digunakan untuk produksi komoditas seperti, bahan baku, upah pekerja, dan energi sehingga menaikkan biaya produksi. Untuk menjaga margin keuntungannya, perusahaan membebankan kenaikan biaya produksi kepada konsumen dengan menaikkan harga barang hasil produksi.



2.1.1.4 Teori Inflasi: Teori Kuantitas Uang

Teori Kuantitas uang pertama kali dikembangkan oleh ekonom Amerika Serikat Irving Fisher dalam bukunya yang berjudul *The Purchasing Power of Money*, yang diterbitkan pada tahun 1911. Fisher ingin menunjukkan hubungan antara total kuantitas uang M (*Money Supply*) dan jumlah total pengeluaran untuk barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian, $P \times Y$, dimana P adalah tingkat harga dan Y adalah output agregat (pendapatan). Konsep yang menghubungkan M dengan $P \times Y$ disebut *Velocity of Money* (kecepatan perputaran uang), rata-rata jumlah uang yang dihabiskan untuk membeli total barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian. Atau lebih tepat didefinisikan sebagai total pengeluaran $P \times Y$ dibagi dengan jumlah uang beredar M :

$$V = \frac{P \times Y}{M} \quad (2.5)$$

Dengan mengalikan kedua sisi persamaan 2 dengan M , maka didapatkan persamaan pertukaran (*equation of exchange*) yang menghubungkan pendapatan nominal dengan kuantitas uang dan kecepatan perputaran uang.

$$M \times V = P \times Y \quad (2.6)$$

Fisher menyederhanakan persamaan diatas dengan mengasumsikan bahwa V dan T konstan. Selain karena alasan simplifikasi agar menjadi persamaan yang berguna, V dan T dianggap konstan karena lembaga ekonomi dan sistem pembayaran relatif stabil dalam jangka pendek. Dengan asumsi ini, maka hubungan langsung antara jumlah uang beredar M dan tingkat harga P dapat

ti.



2.1.2 Jumlah Uang Beredar

2.1.2.1 Pengertian Jumlah Uang Beredar

Jumlah uang beredar mengacu pada total uang yang tersedia dalam suatu perekonomian pada periode waktu tertentu. Jumlah uang beredar mencakup berbagai bentuk uang seperti uang kartal dan uang giral. Uang kartal merupakan uang yang diterbitkan oleh Bank Sentral berbentuk fisik, terdiri atas uang kertas dan uang logam. Sedangkan uang giral merupakan bentuk non-fisik uang yang disimpan dalam rekening bank dan dapat digunakan untuk transaksi non tunai. Uang kartal terdiri atas simpanan di bank umum, seperti tabungan, rekening giro, dan deposito berjangka. Menurut Mishkin (2019), uang beredar dibedakan menjadi dua, yaitu uang beredar dalam arti sempit (M1) dan uang beredar dalam arti luas (M2). M1 terdiri atas uang tunai (*currency*) dan rekening giro (*demand deposits*) yang dapat digunakan untuk transaksi belanja konsumsi rumah tangga sehari-hari. Sedangkan M2 adalah M1 ditambah dengan tabungan (*saving deposits*), deposito berjangka (*time deposits*), dan reksadana (*mutual funds*).

2.1.2.2 Proses Peredaran Uang

Proses peredaran uang melibatkan interaksi antara Bank Sentral, Bank Komersial dan publik dimana masing-masing memiliki pengaruh dalam penciptaan uang yang akan didistribusikan dalam perekonomian.

1. Bank Sentral: bertanggung jawab atas kebijakan moneter dengan mengendalikan uang tunai yang beredar dan cadangan bank.



2. Bank Komersial: menciptakan uang melalui cadangan fraksional dengan meminjamkan sebagian besar pinjaman nasabah, sambil menyimpan sebagian kecil sebagai cadangan.
3. Publik: mempengaruhi pasokan uang melalui preferensi alokasi dana antar memegang uang tunai atau menyimpan dana di bank.

Diantara ketiga pelaku diatas, Bank Sentral memegang peranan penting dalam peredaran uang karena kebijakan moneter yang mempengaruhi perilaku maupun preferensi dari pelaku ekonomi yang lain baik itu bank komersial maupun publik. Bank sentral bekerja dengan menggunakan alat kebijakan tertentu, seperti.

1. Operasi Pasar Terbuka (OTP): Membeli/menjual surat berharga negara (SBN) untuk menyesuaikan basis moneter, misalnya membeli obligasi yang akan menambah cadangan bank.
2. Persyaratan Cadangan: Menetapkan jumlah minimum cadangan yang harus disimpan bank, yang akan memengaruhi kemampuan mereka memberi pinjaman.
3. Suku Bunga Diskonto: Tingkat bunga yang ditetapkan pada pinjaman bank yang akan mempengaruhi biaya pinjaman di bank serta pengaruhnya terhadap jumlah kredit yang diminta publik.
4. Bunga atas Cadangan (*Interest on Reserves/IOR*): menetapkan suku bunga atas cadangan bank yang akan memengaruhi insentif bank untuk menyimpan cadangan berlebih.



Dengan alat kebijakan tersebut, Bank Sentral dapat mengontrol proses peredaran uang. Hal ini dilakukan untuk ekspansi basis moneter dengan

mendorong bank komersial untuk meminjamkan cadangan berlebih sehingga menciptakan simpanan baru. Simpanan baru ini dapat dipinjamkan lagi sehingga memperbesar pasokan uang. Namun proses ini dibatasi oleh banyak hal. Diantaranya, pertama rasio cadangan wajib (r) yang merupakan fraksi simpanan yang harus disimpan sebagai cadangan. Kedua, rasio uang tunai terhadap Deposit (c) yaitu preferensi publik memegang uang tunai daripada menyimpan di bank. Ketiga, rasio Cadangan Berlebih (e) yaitu jumlah cadangan yang melebihi ketentuan yang dilakukan oleh bank terutama saat berada dalam ketidakpastian ekonomi. Proses ini dapat dituliskan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

Pasokan uang (M) ditentukan oleh:

$$M = m \times \text{Basis Moneter (MB)} \quad (2.7)$$

Dimana efek pengganda uang (m) adalah:

$$m = \frac{1+c}{r+c+e} \quad (2.8)$$

Naiknya rasio cadangan uang tunai terhadap deposit dapat mengurangi efek pengganda uang karena lebih banyak uang tunai yang dipegang di luar bank sehingga pasokan uang di bank akan berkurang. Begitupun dengan naiknya rasio cadangan wajib dan cadangan berlebih yang dapat mengurangi pasokan uang sehingga kapasitas pinjaman turun, hal ini juga akan mengurangi efek pengganda uang. Selain itu ekspektasi terhadap kondisi ekonomi dapat mendorong bank

meningkatkan cadangan berlebih (cadangan berlebih naik) atau publik menimbun uang tunai (rasio cadangan uang tunai terhadap deposit naik).



2.1.3 Suku Bunga

Suku bunga merupakan biaya pinjaman atau imbalan atas investasi yang dinyatakan dalam persentase dari jumlah pokok. Suku bunga mempengaruhi keputusan rumah tangga, bisnis dan pemerintah dalam menabung, meminjam, dan berinvestasi. Mishkin (2019) membagi dua jenis suku bunga yaitu, suku bunga nominal dan suku bunga riil. Suku bunga nominal merupakan tingkat bunga yang tertera tanpa memperhitungkan inflasi. Sedangkan suku bunga riil adalah suku bunga nominal yang telah disesuaikan dengan inflasi. Hubungan dari kedua jenis suku bunga tersebut dapat dinyatakan dalam persamaan Fisher sebagai berikut.

$$r = i - \pi^2 \quad (2.9)$$

Dimana:

i = suku bunga nominal

r = suku bunga riil

π^2 = ekspektasi inflasi.

Ekspektasi inflasi merupakan faktor yang mempengaruhi suku bunga riil. jika masyarakat menduga inflasi akan naik, suku bunga nominal akan menyesuaikan untuk mempertahankan suku bunga riil, begitupun sebaliknya. Selain itu kebijakan bank sentral juga dapat menaikkan suku bunga nominal lebih cepat dari inflasi sehingga suku bunga riil meningkat.



Suku bunga dan inflasi memiliki hubungan yang kompleks dan timbal balik memengaruhi kebijakan moneter, investasi, dan stabilitas ekonomi. Bank

sentral menggunakan suku bunga sebagai alat utama dalam mengendalikan inflasi. Transmisi kebijakan moneter dilakukan melalui pengetatan moneter dengan menaikkan suku bunga yang menyebabkan biaya pinjaman semakin mahal dan membuat masyarakat enggan untuk meminjam. Implikasi lebih lanjut konsumsi dan investasi akan turun sehingga permintaan agregat menurun. Proses ini akan membuat inflasi turun dan terkendali, dan begitupun sebaliknya.

2.1.4 Upah

2.1.4.1 Pengertian Upah

Menurut International Labour Organization (ILO), upah merujuk pada remunerasi atau pendapatan yang diterima pekerja sebagai kompensasi atas tenaga, waktu, dan keahlian yang mereka kontribusikan dalam pekerjaan. Definisi ini mencakup komponen moneter dan non-moneter dalam artian tidak hanya dalam bentuk moneter, namun juga mencakup fasilitas berupa perumahan, makanan atau layanan kesehatan. Secara lebih eksplisit, PP No. 36/2021 mendefinisikan upah sebagai hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.

Secara umum, penetapan upah yang dilakukan oleh lembaga pengupahan, mengadopsi prinsip keadilan dan keseimbangan, yaitu upah harus memenuhi

ur upah layak (*living wage*) yang memungkinkan pekerja memenuhi
ihan dasar (pangan, perumahan, dan pendidikan) dan partisipasi dalam



kehidupan sosial. Selain itu, penetapan upah juga harus sejalan dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Secara konseptual, ekonom umumnya membedakan upah menjadi upah nominal dan upah riil. Upah nominal adalah jumlah uang yang diterima pekerja sebelum disesuaikan dengan inflasi atau perubahan harga. Ini adalah nilai di atas kertas yang tercantum dalam kontrak atau slip gaji. Sedangkan upah riil adalah upah nominal yang disesuaikan dengan tingkat inflasi atau perubahan harga, digunakan untuk mengukur daya beli pekerja. ini menunjukkan berapa banyak barang/jasa yang dapat dibeli dengan upah tersebut. Jika upah riil turun, pekerja mengalami penurunan daya beli meskipun upah nominal naik. untuk menghitung upah riil, dapat menggunakan persamaan berikut:

$$\text{Upah Riil} = \frac{\text{Upah Nominal}}{\text{Indeks Harga Konsumen (IHK)}} \times 100 \quad (2.10)$$

Pembedaan antara upah nominal dan upah riil dilakukan untuk menganalisis tingkat kesejahteraan pekerja apakah standar hidup pekerja dapat ditingkatkan atau dipertahankan. Selain pemerintah juga dapat menyesuaikan upah minimum dengan menjaga upah riil.

2.1.4.2 Kausalitas Upah-Harga

Hubungan kausalitas upah dan harga menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut dapat saling mempengaruhi dalam perekonomian. Terdapat dua arah dalam menjelaskan hubungan ini. Menurut Blanchard (2016), kenaikan upah akan meningkatkan biaya produksi sehingga mendorong kenaikan harga. Disisi



lain, kenaikan harga dapat memicu tuntutan kenaikan upah nominal karena upah riil turun sehingga menurunkan daya beli.

2.1.5 Harga Minyak Bumi

Fluktuasi harga minyak merupakan sebuah siklus yang sering terjadi pada industri migas. Menurut Blanchard dan Gali (2007), minyak mentah memiliki produk turunan yaitu bahan bakar, yang merupakan input vital dalam proses produksi hampir semua sektor ekonomi modern (transportasi, manufaktur, pertanian, jasa logistik, dan pembangkit listrik). Ketika harga minyak bumi naik secara signifikan, biaya output per unit bagi perusahaan-perusahaan yang menggunakan minyak secara intensif juga akan mengalami kenaikan. Kenaikan biaya ini bersifat langsung (*direct*) karena minyak adalah input langsung dalam proses produksi.

Kenaikan biaya marjinal produksi menyebabkan kurva penawaran agregat jangka pendek (*Short-Run Aggregate Supply - SRAS*) bergeser ke kiri. Pergeseran ini terjadi karena pada tingkat harga output yang sama, perusahaan kini bersedia memproduksi lebih sedikit (karena biaya lebih tinggi), atau untuk memproduksi jumlah yang sama, mereka perlu menaikkan harga outputnya. Proses ini juga mengakibatkan keseimbangan baru dengan tingkat harga yang lebih tinggi (inflasi) dan output yang lebih rendah (atau pertumbuhan melambat), dengan asumsi *ceteris paribus*. Jadi kenaikan harga minyak bumi akan berdampak pada inflasi dari sisi penawaran (*cost push inflation*).



's

urs (nilai tukar) merupakan harga relatif suatu mata uang terhadap mata uang

a. Menurut Sukirno (2015), nilai tukar adalah jumlah mata uang domestik

yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Untuk itu, fluktuasi kurs berdampak pada harga-harga barang yang diperoleh dari luar negeri (impor). Apabila mata uang domestik suatu negara nilainya naik secara relatif terhadap mata uang negara lainnya (apresiasi), maka barang yang dihasilkan oleh negara tersebut di luar negeri menjadi mahal dan barang yang berasal dari luar negeri menjadi murah (asumsi harga dalam negeri kedua negara konstan), namun sebaliknya jika mata uang domestik suatu negara nilainya turun secara relatif terhadap mata uang negara lainnya (depresiasi), maka barang yang dihasilkan oleh negara tersebut akan lebih murah di luar negeri dan harga barang dari luar negeri akan menjadi lebih mahal di negara tersebut (Mishkin, 2009).

Dornbusch (1976), mengemukakan bahwa depresiasi kurs akan berpengaruh langsung pada kenaikan biaya input yang diimpor dan berefek langsung pada kenaikan biaya komoditas yang diproduksi dalam negeri sehingga diteruskan pada harga komoditas tersebut. Depresiasi kurs yang besar (*overshooting*) dan mendadak membuat barang impor menjadi jauh lebih mahal dalam mata uang domestik. Hal ini langsung mendorong kenaikan barang konsumsi akhir yang termasuk dalam komponen indeks harga konsumen seperti pangan. Selain itu, input produksi impor juga akan mengalami kenaikan. Bahan baku, komponen setengah jadi, mesin, minyak mentah, dll., yang digunakan oleh industri domestik menjadi lebih mahal. Biaya produksi perusahaan-perusahaan dalam negeri yang bergantung pada input impor naik signifikan. Seiring waktu, perusahaan-perusahaan domestik mulai meneruskan (*pass-through*) kenaikan biaya input



mereka ke harga jual domestik sehingga menyebabkan inflasi yang dipicu oleh biaya produksi (*cost push inflation*).

2.2 Tinjauan Empirik

Tujuan dari tinjauan empiris adalah untuk memberikan ringkasan yang komprehensif dari studi yang ada pada topik penelitian yang ditentukan, dengan penekanan pada temuan, pendekatan metodologis, dan keterbatasan penelitian. Pendekatan ini memfasilitasi kontekstualisasi penelitian dalam literatur yang lebih luas tentang topik tersebut. Dalam konteks topik penelitian ini, penulis akan menggali informasi dari penelitian-penelitian terdahulu yang membahas inflasi baik dari sisi permintaan maupun penawaran.

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk menyelidiki penyebab utama inflasi dari sisi permintaan dan penawaran, khususnya dalam konteks Indonesia. Sebuah tinjauan terhadap literatur yang ada menunjukkan sejumlah besar temuan, tergantung pada variabel penelitian yang digunakan, data empiris yang digunakan, karakteristik ekonomi dari domain penelitian, dan model statistik yang diterapkan. Sejumlah besar penelitian telah meneliti inflasi dari perspektif permintaan atau penawaran. Namun, penelitian yang membahas penyebab inflasi dari berbagai sisi merupakan hal baru, terutama setelah merebaknya pandemi COVID-19.

Stiglitz dan Regmi (2023), meneliti secara simultan penyebab inflasi dari permintaan dan penawaran untuk melihat faktor utama yang menyebabkan di Amerika Serikat. Temuannya menunjukkan bahwa fluktuasi inflasi terbesar berasal dari gangguan sisi pasokan sektoral, terutama akibat



pandemi COVID-19, gangguan rantai pasokan, dan invasi Rusia ke Ukraina yang mengganggu pasar energi dan pangan. Pola permintaan juga mengalami perubahan signifikan akibat pandemi. Data terbaru menunjukkan moderasi signifikan dari tekanan inflasi, dengan kenaikan upah nominal hanya sedikit di atas tingkat pra-pandemi. Ini, bersama dengan indikator lain seperti ekspektasi inflasi yang terkendali, mengurangi kekhawatiran tentang spiral upah-harga yang mulai terjadi.

Disisi lain, Blanchard dan Bernanke (2022), mengusulkan model empiris yang sederhana untuk menjelaskan penyebab inflasi selama pandemi. Model tersebut diestimasi menggunakan *Impulse Response Functions* (IRF) dengan data sebelum COVID-19 untuk menganalisis stabilitas hubungan antara upah, harga, dan ekspektasi inflasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa guncangan harga energi dan makanan, serta kekurangan rantai pasokan, memainkan peran penting dalam lonjakan inflasi. Dampak awal dari pasar tenaga kerja yang ketat dapat diabaikan, tetapi secara bertahap meningkat seiring waktu. Guncangan harga telah terbukti memiliki dampak sementara terhadap inflasi, sementara guncangan pasar tenaga kerja yang ketat telah terbukti menyebabkan inflasi yang terus meningkat. Telah ditunjukkan bahwa model konvensional dari dinamika spiral upah-harga masih dapat diterapkan, dan para pembuat kebijakan disarankan untuk berhati-hati terhadap tekanan inflasi yang berasal dari pasar tenaga kerja.



Penelitian mengenai inflasi juga telah dilakukan secara parsial di Asia. Lee im (2021), meneliti tingkat inflasi di Korea Selatan dan Jepang dari tahun hingga 2020. Temuan mereka mengungkapkan bahwa upah minimum

memiliki pengaruh yang dapat diabaikan terhadap inflasi, terutama karena tingkat produktivitas yang tinggi dan keunggulan sektor jasa teknologi. Lebih lanjut Rahman dan Hossain (2022), menemukan bahwa di Bangladesh dan Pakistan, inflasi dipicu oleh kombinasi JUB ekspansif dan volatilitas harga minyak dengan transmisi yang cepat. Menurut Nguyen dkk. (2021), analisis data dari lima negara ASEAN (2005-2020) menunjukkan adanya korelasi positif antara kenaikan harga minyak global dan kenaikan inflasi berikutnya, dengan kenaikan rata-rata 0,5 persen untuk setiap kenaikan 10 persen harga minyak. Studi ini mengidentifikasi bahwa dampak kenaikan harga minyak terhadap inflasi paling signifikan terjadi di Filipina dan Thailand.

Di Indonesia sendiri, banyak penelitian mengenai inflasi telah dilakukan secara parsial. Prasetyo dan Wibowo (2021), menggunakan data dari tahun 2001 hingga 2020 dan menggunakan metode *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) untuk memastikan bahwa JUB memiliki pengaruh positif yang substansial terhadap inflasi jangka panjang (koefisien 0,32). Namun, studi tersebut menemukan bahwa dampak JUB terhadap inflasi jangka pendek tidak signifikan secara statistik. Selain itu, studi Hartono dan Wijaya (2020) menemukan efektifitas kebijakan suku bunga dalam mengontrol inflasi di Indonesia dengan data time series bulanan periode 2010 - 2019 menggunakan model VECM untuk menguji hubungan jangka pendek dan jangka panjang, serta *lag time*. Mereka menemukan bahwa kenaikan 1 persen suku bunga BI, mengurangi inflasi 0,25 persen dalam 6 bulan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan suku bunga lebih efektif dalam mengontrol inflasi.



Sebaliknya, Sari dkk. (2022), melakukan penelitian yang menguji dampak UMP terhadap inflasi di Jawa dan Sumatera dari tahun 2010 hingga 2021. Temuannya menunjukkan bahwa kenaikan UMP sebesar 10 persen menyebabkan kenaikan inflasi yang berkisar antara 0,15 hingga 0,25 persen, dengan dampak yang lebih nyata terlihat di daerah padat industri seperti Jakarta dan Surabaya. Hakim dkk. (2023), meneliti transmisi harga minyak terhadap inflasi di Indonesia (2001-2024) dengan menggunakan metode NARDL. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan harga minyak memberikan pengaruh asimetris terhadap inflasi. Secara khusus, kenaikan harga minyak sebesar 10 persen menghasilkan lonjakan inflasi sebesar 0,45 persen, sementara penurunan sebesar 10 persen hanya menghasilkan penurunan inflasi sebesar 0,2 persen.

Kurniawan (2022), menganalisis dampak depresiasi nilai tukar rupiah terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Dengan data periode 2015 - 2021 menggunakan model ARDL, ia menemukan depresiasi rupiah signifikan memicu inflasi di Indonesia. Depresiasi rupiah sebesar 1 persen meningkatkan inflasi rata-rata sebesar 0,3 persen. Efek lebih kuat pada barang impor elastis seperti bahan baku industri, obat-obatan, dan elektronik.

2.3 Kerangka Penelitian

Inflasi dapat dikonseptualisasikan dari dua perspektif yang berbeda, masing-masing berdasarkan oleh penyebabnya. Pertama, inflasi dari sisi permintaan, yang



dianggap sebagai inflasi tarikan permintaan. Jenis inflasi ini ditandai dengan kenaikan harga secara umum yang terjadi ketika permintaan agregat melebihi penawaran agregat, sehingga terjadi kelebihan permintaan. Kelebihan permintaan

dapat dipicu oleh peningkatan jumlah uang beredar. Dengan kata lain, peningkatan kepemilikan mata uang oleh masyarakat sesuai dengan kecenderungan yang tinggi untuk membeli barang. Dengan tidak adanya eskalasi yang setara dalam produksi, fenomena ini dapat mengakibatkan kenaikan harga.

Friedman (1968), mengakui bahwa kelebihan permintaan yang kemudian menimbulkan inflasi adalah konsekuensi dari ekspansi moneter yang tidak terkendali. Ia menyimpulkan bahwa kenaikan inflasi adalah semata-mata fenomena moneter. Hubungan antara inflasi dan jumlah uang beredar dikonfirmasi oleh penelitian Irving Fisher (1911). Dalam temuannya mengenai "*Quantity Theory of Money*", Fisher menyimpulkan bahwa kenaikan jumlah uang beredar akan menyebabkan kenaikan harga, dengan asumsi bahwa kecepatan perputaran uang konstan.

Jenis inflasi kedua, diklasifikasikan berdasarkan penyebabnya, adalah inflasi dari sisi penawaran atau inflasi akibat dorongan biaya. Bentuk inflasi ini ditandai dengan kenaikan harga yang diakibatkan oleh kenaikan biaya produksi. Fenomena ini terjadi ketika biaya barang yang digunakan dalam produksi, termasuk bahan baku, tenaga kerja, dan peralatan produksi, meningkat, sehingga meningkatkan biaya produksi. Untuk mempertahankan margin keuntungan, pemilik produksi terpaksa mengalihkan kenaikan biaya produksi kepada konsumen dengan menaikkan harga barang mereka. Dalam studinya, Stiglitz dan Regmi (2023), memberikan kritik terhadap kebijakan pengetatan moneter yang diterapkan di Amerika Serikat untuk

si inflasi selama periode pandemi global. Bukti yang disajikan menunjukkan permintaan agregat menunjukkan korelasi terbalik dengan inflasi saat ini, menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga bukanlah strategi yang tepat

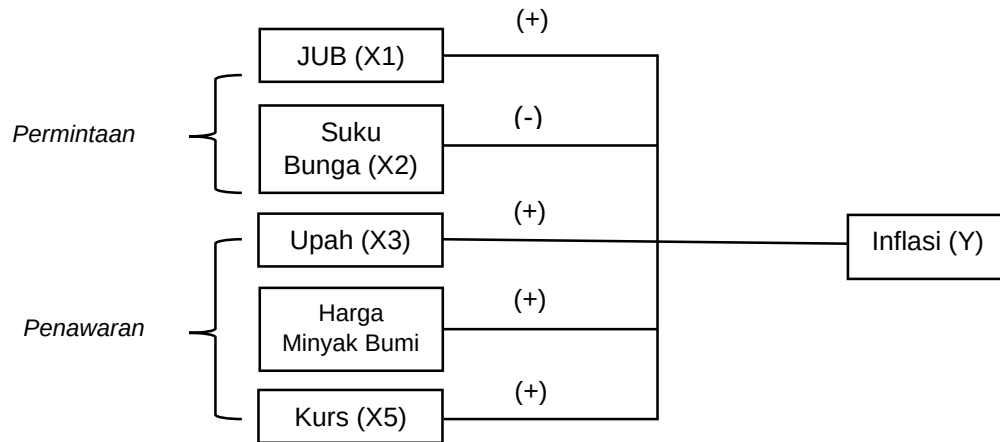


untuk mengurangi inflasi. Berlawanan dengan asumsi sebelumnya, telah ditentukan bahwa inflasi terutama didorong oleh guncangan pasokan, dengan gangguan pada rantai pasokan energi dan makanan menjadi faktor penyebab yang signifikan. Blanchard dan Bernanke (2023), menyatakan bahwa, meskipun inflasi saat ini terutama didorong oleh guncangan pasokan, pasar tenaga kerja sedang mengalami periode pengetatan, yang menunjukkan bahwa upah dapat berevolusi menjadi pendorong yang lebih persisten dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, penelitian empiris lebih lanjut diperlukan untuk memvalidasi temuan-temuan dari penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, dilakukan pengujian terhadap faktor-faktor yang memicu inflasi dari perspektif permintaan dan penawaran, dengan memasukkan variabel domestik dan internasional. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini mencakup jumlah uang beredar (JUB) dan suku bunga, yang mengindikasikan inflasi tarikan permintaan (*demand-pull inflation*), serta inflasi dorongan biaya (*cost-push inflation*), yang diwakili oleh upah, harga minyak bumi, dan kurs..

Dengan demikian, kerangka kerja penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.





Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan pernyataan sementara yang diajukan sebagai jawaban atau prediksi atas pertanyaan penelitian. Hipotesis penelitian berguna untuk memberikan arah penelitian yang memandu peneliti untuk fokus pada variabel atau hubungan yang akan diteliti, sehingga menghindari penyimpangan tujuan peneliti. Berdasarkan tinjauan teoritis dan kerangka pikir diatas, penelitian ini mencoba menyajikan hipotesis terkait hubungan antravariabel dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Diduga jumlah uang beredar berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia.
2. Diduga suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia.



3. Diduga upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia
4. Diduga harga minyak bumi berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia.
5. Diduga kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia.

